

## LAMPIRAN 1

### RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
<b>PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA</b>								
1. PERKUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	1. Penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terintegrasinya Perda PB dalam peraturan daerah terkait seperti RTRW, IMB, Kawasan Industri dll	Utama: Bappeda dan Litbangda Pendukung: Bagian Hukum Setda, BPBD, Dinas pekerjaan Umum dan penataan Ruang (PUPR), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, , BBWS					
	2. Penyusunan Aturan tentang Pembentukan Forum PRB	1. Dibentuknya Forum PRB daerah berdasarkan aturan dan mekanisme yang telah disusun	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					
		2. Adanya Forum PRB yang berkontribusi signifikan terhadap percepatan upaya PRB di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					
	3. Penyusunan Aturan Daerah tentang Penyebaran Informasi Kebencanaan	1. Adanya aturan daerah yang memperkuat mekanisme dan prosedur penyebaran informasi kebencanaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda					
		2. Terintegrasinya mekanisme dan prosedur penyebaran informasi di daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Libangda, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum Setda					
	4. Penyusunan Aturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana	1. Adanya aturan daerah yang memperkuat implementasi Rencana Penanggulangan Bencana daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, BPS					
		2. Adanya Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Gugus Tugas RPB yang melingkupi tugas pokok dan fungsi Gugus Tugas dalam pengarusutamaan dan monev RPB.	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					
	5. Pembentukan Forum PRB Kabupaten Kotawaringin Barat	1. Terbentuknya Forum PRB yang beranggotakan berbagai komponen/kelompok untuk pengurangan risiko bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					
		2. Adanya dokumen legalitas Forum pengurangan risiko bencana (FPRB) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan secara formal dalam upaya PRB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
		3. Tersusunnya mekanisme dan struktur organisasi Forum PRB beserta fungsi dari masing-masing komponen/struktur.	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Bagian Hukum Setda					
2. PENGAJIAN RISIKO DAN PERENCANAAN TERPADU	6. Review Peta Bahaya Kabupaten Kotawaringin Barat	Terlaksananya review peta bahaya dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPS, Dinas Lingkungan Hidup					
	7. Review Peta Kerentanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Terlaksananya review peta kerentanan dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Disdukcapil, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BPS, Dinas Lingkungan Hidup					
	8. Review Peta Kapasitas Kabupaten Kotawaringin Barat	Terlaksananya review peta kapasitas dengan melibatkan instansi terkait di Kabupaten Kotawaringin Barat	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Disdukcapil, BMKG, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BPS, Dinas Lingkungan Hidup					
	9. Penerapan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Adanya aturan daerah yang memperkuat keterlibatan instansi pemerintahan untuk penggunaan RPB dalam perencanaan instansi masing-masing.	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial, Disdukcapil, BMKG, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, BPS, Dinas Lingkungan Hidup					
3. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	10. Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah	1. Adanya aturan daerah tentang penyebaran data dan informasi kejadian kebencanaan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Perhubungan					
		2. Adanya pembaruan dan pengolahan data-data informasi bencana secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Perhubungan					
		3. Digunakannya informasi kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan dan disampaikan kepada multi stakeholder	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Perhubungan					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	11. Penambahan dan Pemeliharaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah	1. Tersedianya alokasi anggaran untuk penambahan dan pemeliharaan gudang logistik	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri					
		2. Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan tempat penyimpanan/ pergudangan logistik PB	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri					
	12. Penguatan lembaga pemerintah yang menangani pemeliharaan peralatan dan <i>supply</i> chain logistik	1. Adanya lembaga di pemerintahan yang menangani pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri					
		2. Terpenuhinya sumber daya yang cukup dalam menangani pemeliharaan peralatan dan ketersediaan supply chain logistik untuk kebutuhan darurat bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri					
		3. Dilakukannya pemeliharaan peralatan dan pemenuhan ketersediaan supply chain untuk masa tanggap darurat bencana berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana dan/ atau hasil rencana evakuasi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Sosial, Basarnas, TNI, Polri					
	4. PENANGANAN TEMATIK KAWASAN RAWAN BENCANA	13. Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	1. Terlaksananya sosialisasi rumah sakit dan puskesmas aman bencana					
2. Adanya perencanaan program dan kegiatan di Rumah Sakit di daerah rawan bencana yang mengadaptasi 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana).			Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)					
		3. Diterapkannya 4 modul safety hospital (kajian keterpaparan acaman, gedung/bangunan aman, sarana prasarana rumah sakit aman, kemampuan penyelenggaraan penanggulangan bencana) oleh Rumah Sakit yang berada di daerah rawan bencana	Utama: Dinas Kesehatan Pendukung: RSUD, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
5. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA	14. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori	1. Adanya penerapan sumur resapan dan/atau biopori dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas penerapan sumur resapan dan/atau biopori di daerah dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
	15. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air	1. Adanya penerapan perlindungan daerah tangkapan air dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas penerapan perlindungan daerah tanggapan air dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
	16. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai	1. Adanya upaya restorasi sungai dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan restorasi sungai dalam menurunkan frekuensi dan luasan banjir dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
	17. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng	1. Adanya upaya penguatan lereng dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Adanya kajian untuk menilai efektifitas kegiatan penguatan lereng dalam menurunkan frekuensi dan luasan tanah longsor dalam setahun terakhir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	18. Penguatan Aturan Daerah tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Air Permukaan untuk Pengurangan Risiko Bencana Kekeringan	1. Adanya kegiatan awal di tingkat daerah dalam pengelolaan air permukaan untuk pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan yang belum di atur dalam peraturan daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Adanya Perda yang mengatur operasionalisasi dan implementasi pengelolaan air permukaan	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		3. Adanya program optimalisasi pengelolaan air permukaan dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
	19. Penguatan Aturan Daerah tentang Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pemantauan Area Hulu DAS untuk Deteksi dan Pencegahan Bencana Banjir	1. Adanya kegiatan awal atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kabupaten)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran					
		2. Adanya kebijakan yang mendukung inisiatif atau keterlibatan daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS (pendekatan landskap, lintas administratif kabupaten)	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran					
		3. Adanya kebijakan kerjasama para pihak dalam mengembangkan sistem pengelolaan dan pemantauan terpadu area hulu DAS berbasis pendekatan landskap	Utama: Dinas Lingkungan Hidup Pendukung: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran					
	20. Pembangunan/revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir	1. Adanya rancangan dan/atau kegiatan untuk revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman dalam upaya mitigasi struktural bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulan Bencana					
		2. Adanya aturan yang mendukung revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman di daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
		3. Terlaksananya revitalisasi tanggul/embung/waduk dan taman sebagai upaya mitigasi bencana banjir	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
	21. Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir Bandang melalui konservasi vegetatif DAS	1. Dilakukannya mitigasi struktural bencana banjir bandang melalui konservasi vegetatif di DAS di daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		2. Ada kebijakan tentang konservasi vegetatif DAS di wilayah rawan banjir bandang daerah	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
		3. Ada program dan kegiatan konservasi vegetatif di wilayah DAS yang rawa banjir bandang secara berkelanjutan	Utama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pendukung: Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran					
6. PERKUATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	22. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Banjir sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana banjir yang dapat diturunkan menjadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	23. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah	1. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana banjir secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana banjir	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	24. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana tanah longsor di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana tanah longsor sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Tanah Longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana tanah longsor yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
	25. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah	1. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini tanah longsor secara berkala oleh multi stakeholder di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana tanah longsor	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
	26. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Epidemid dan Wabah Penyakit melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana Epidemid dan Wabah Penyakit di daerah	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana Epidemid dan Wabah Penyakit sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Epidemid dan Wabah Penyakit		Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan						
3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana Epidemid dan Wabah Penyakit yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana epidemid dan wabah penyakit		Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan						

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	27. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Epidemi dan Wabah Penyakit Daerah	1. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana Epidemi dan Wabah Penyakit secara berkala oleh multi stakeholder	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Adanya sistem peringatan dini yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	Utama: Dinas Kehutanan Pendukung: BPBD, Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
	28. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kekeringan melalui Perencanaan Kontijensi	1. Terselenggaranya kajian-kajian teknokratis penyusun skenario terburuk bencana kekeringan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
		2. Tersusunnya rencana kontijensi bencana kekeringan sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
		3. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana kekeringan yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana kekeringan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
	29. Pembangunan Sistem Peringatan Dini Bencana Kekeringan Daerah	1. Adanya rancangan untuk membangun sistem peringatan dini bencana kekeringan di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
2. Terlaksananya pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana kekeringan secara berkala oleh multi stakeholder di daerah		Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan						
3. Meningkatnya sensitivitas masyarakat akan upaya penyelamatan diri secara mandiri dari bencana kekeringan		Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan						

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	30. Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Cuaca Ekstrem melalui Perencanaan Kontijensi	1. Tersusunnya Rencana Kontijensi Bencana Cuaca Ekstrem sesuai dengan Prosedur Tetap Penanganan Darurat Bencana atau Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Cuaca Ekstrem 2. Terlaksananya ujicoba rencana kontijensi bencana banjir bandang yang dapat diturunkan menjadi Rencana Operasi pada masa tanggap darurat bencana Cuaca Ekstrem	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan  Utama: BPBD Pendukung: Bappeda dan Litbangda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP dan pemadam Kebakaran, Dinas Sosial PPA PPKB, Dinas Kesehatan					
	31. Pembangunan sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrem	Terselenggaranya sistem peringatan dini bencana cuaca ekstrem yang menyentuh tiap lapisan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh media yang tersedia	Utama: BPBD Pendukung: Dinas Pendidikan, Dinas Sosial PPA PPKB, Ormas, LSM, Forum PRB					
<b>PROGRAM PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA</b>								
	32. Penetapan Status Darurat Bencana	Adanya kebijakan penganggaran terkait ditetapkannya status tanggap darurat dalam penanggulangan bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	33. Operasi Tanggap Darurat Bencana	Terselenggaranya operasi darurat bencana secara efektif sesuai dengan prosedur.	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	34. Pelaksanaan Kaji Cepat untuk Penetapan Status Darurat Bencana	Digunakannya hasil kaji cepat sebagai dasar penentuan status tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	35. Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis	Terlaksananya penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis secara efektif sesuai dengan prosedur yang berlaku.	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	36. Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana	Pulihnya fungsi fasilitas kritis dengan segera dalam 1x24 jam pada masa tanggap darurat bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
	37. Pengerahan bantuan Kemanusiaan saat darurat bencana hingga Masyarakat terjauh sesuai dengan mekanisme	Terjangkaunya masyarakat terjauh dalam pendistribusian bantuan kemanusiaan	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					

KEGIATAN	AKSI	INDIKATOR AKSI	KETERLIBATAN INSTITUSI	TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
	38. Penghentian Status Darurat Bencana	Prosedur penghentian status tanggap darurat tersebut mampu mengembalikan kondisi aktivitas masyarakat (normal kembali)	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan					
7. PENGEMBANGAN SISTEM PEMULIHAN BENCANA	39. Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana	Adanya jaminan kelanjutan semua fungsi pemerintahan dan/atau administrasi penting pasca bencana	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial					
	40. Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana	Adanya jaminan keberlangsungan fungsi infrastruktur penting pasca bencana di daerah	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial					
	41. Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana	Terlaksananya perbaikan rumah penduduk secara terukur mampu mengurangi risiko masyarakat terhadap ancaman bencana yang telah terjadi	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial					
	42. Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru	Terbangunnya budaya komunitas yang berorientasi pada aspek kapasitas jaringan pangan, kesehatan umum, perekonomian dalam hal pengurangan terbentuknya kelompok-kelompok miskin dan asuransi infrastruktur dan asset penduduk dengan partisipasi setiap komponen komunitas	Utama: BPBD Pendukung: Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Basarnas, Pol PP, Dinas Sosial					